

**PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN**

Ahmad Afandi /D 101 10 440

*Abstrack*

*Hutan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara yang memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, cenderung kondisinya semakin menurun. Hutan juga merupakan salah satu sumber daya alam yang berperan dalam menjaga, mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan air dan kesuburan tanah. Ketersediaan air dan kesuburan tanah merupakan urat nadi kehidupan manusia. Hutan merupakan 60% luas daratan Indonesia, sebenarnya merupakan kekayaan alam yang sangat penting dan strategis. Kerusakan hutan yang terus terjadi telah mengakibatkan bencana yang menelan korban harta dan jiwa yang tidak sedikit, seperti musibah kebakaran, banjir dan tanah longsor pada musim hujan dan lain sebagainya. Hal ini tentu merupakan tantangan bagi semua pihak untuk mencari akar permasalahan dan solusi pemecahannya. Disamping itu lemahnya penerapan sanksi bagi Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Perusakan Hutan berdasarkan UU No.18/2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang lolos dari jeratan hukum. Realita inilah yang melatar belakangi mengapa saya melakukan penelitian ini. Penelitian ini termasuk kategori penelitian library research, yaitu pola penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Hasil sumber data yang telah diperoleh baik dari sumber primer maupun sekunder.*

Kata Kunci : Penyertaan Dalam Tindak Pidana Perusakan Hutan

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Selanjutnya disebut dengan (UU No.18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan). Ditentukan bahwa perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan

dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum. Selain itu, dalam undang-undang tersebut diaturpulah UU No.18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Perusakan Hutan memiliki tujuan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan dan menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya. (Pasal 3 : UU No.18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan).<sup>1</sup>

Hutan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya, Perusakan Hutan yaitu proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah. Penggunaan kawasan

hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan atau pertambangan tanpa izin Menteri, Terorganisasi yaitu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial. Sesuai dengan Pasal 11 UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan :<sup>2</sup>

- (1). Perbuatan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi.

---

<sup>1</sup>UU No. 18/2013., tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan psl 3, hlm 6.

---

<sup>2</sup>Ibid., Psl 11 Bab IV , hlm 8.

(2). Perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan.

(3). Kelompok terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.

(4). Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus

mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan mengenai penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Perlu diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan oleh Undang-Undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pada barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran

dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan atas segala bentuk tindak pidana yang

telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar telah terjadinya suatu tindak pidana perusakan hutan.<sup>3</sup>

Hutan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara yang memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, cenderung kondisinya semakin menurun. Hutan juga merupakan salah satu sumber daya alam yang berperan dalam menjaga, mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan air dan kesuburan tanah. Ketersediaan air dan kesuburan tanah merupakan urat nadi kehidupan manusia. Kerusakan hutan yang terjadi memberikan akibat yang nyata bagi kehidupan manusia. Sekarang orang merasakan betapa pentingnya menjaga dan memelihara karena begitu banyak bencana yang terjadi akibat kelalaian dan keserakahan manusia. diperlakukan semena-mena tanpa memikirkan dampak dan akibatnya ketika hutan menjadi rusak memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan

---

<sup>3</sup>Amir Ilyas., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Yogyakarta, 2012, hlm 18.

sekitar. Kerusakan hutan yang terus terjadi telah mengakibatkan bencana yang menelan korban harta dan jiwa yang tidak sedikit, seperti musibah kebakaran dan kekeringan pada musim kemarau, banjir dan tanah longsor pada musim hujan dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah sistem pembebanan tanggungjawab pada penyertaan?
2. Bagaimanakah sanksi pidana terhadap pelaku penyertaan tindak pidana dalam perusakan hutan berdasarkan UU No.18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ?

## II. PEMBAHASAN

### 1. Sistem Pembebanan Tanggung Jawab Pada Penyertaan.

Penyertaan dalam pasal 55 KUHP di klasifikasikan atas 4 bagian yaitu, *pleger*, *doen pleger*, *medepleger*, *uitlokker*. Suatu penyertaan dikatakan terjadi jika dalam suatu peristiwa tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Keterlibatan seseorang dalam peristiwa pidana ini dapat dilakukan secara psikis maupun fisik, sehingga harus dicari pertanggungjawaban masing-masing orang yang terlibat dalam peristiwa pidana tersebut. Harus dicari sejauh mana peranan masing-masing, sehingga dapat diketahui sejauh mana pertanggungjawabannya.

Menurut *JE Sahetapy* untuk memasukkan unsur pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP harus dijelaskan peranan masing-masing dari tindak pidana tersebut. Pasal 55 menjelaskan masing-masing pelaku tindak pidana tersebut, maka akan dapat dilihat peranan dan kadar kejahatan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku tindak pidana.<sup>5</sup> Tanpa

---

<sup>4</sup>[Http://www.blogger.com/](http://www.blogger.com/) Pengertian Hutan.

---

<sup>5</sup> *Mohammad eka putra dan Abul khair, percobaan dan penyertaan, Penerbit Rineka Cipta, Medan, 2009, hal 39.*

menguraikan peranan masing-masing sebagaimana yang dimaksud dengan putusan No.317/Pid.Sus/2014/PN. PAL. Bahwa mereka yang melakukan tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta melakukan* perusakan hutan. Menurut *Van Hamel* penyertaan adalah ajaran pertanggungjawaban atau pembagian pertanggungjawaban dalam hal suatu tindak pidana yang menurut pengertian perundang-undangan, dapat dilaksanakan oleh seorang pelaku dengan tindakan secara sendiri. Dalam hal ini secara logis pertanggungjawabannya pun harus dibagi diantara peserta, dengan perkataan lain, tiap-tiap peserta harus juga turut dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, berhubung tanpa perbuatannya tidak mungkin tindak pidana tersebut diselesaikannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa penyertaan dalam suatu tindak pidana terdapat apabila dalam suatu tindak pidana tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang. Hubungan antar peserta dalam

menyelesaikan tindak pidana tersebut bermacam-macam, yaitu :<sup>6</sup>

1. Bersama-sama melakukan suatu kejahatan.
2. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
3. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

Karena hubungan dari pada tiap peserta terhadap tindak pidana tersebut dapat mempunyai berbagai bentuk, ajaran penyertaan ini berpokok pada : “menentukan pertanggungjawaban daripada tiap peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan”. Disamping menentukan pertanggungjawaban tiap peserta, ajaran ini juga mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap peserta dalam suatu pelaksanaan tindak pidana

---

<sup>6</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 58

sumbangan apa yang telah diberikan oleh tiap-tiap peserta, agar tindak pidana tersebut dapat diselesaikan` *Van Hamel* mengatakan penyertaan adalah “Ajaran pertanggungjawaban atau pembagian pertanggungjawaban dalam hal suatu tindak pidana yang menurut pengertian perundang-undangan, dapat dilaksanakan oleh seorang pelaku dengan tindakan sendiri.”<sup>7</sup> Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sangsi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi

pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Aturan umum hukum pidana ini dapat dikatakan sebagai landasan dan mengikat ketentuan hukum pidana perihal larangan-larangan melakukan perbuatan yang disertai ancaman pidana bagi yang melanggar larangan tersebut, baik yang dimuat dalam Buku II dan Buku III KUHP maupun yang berada di luarnya.<sup>8</sup> Hubungan antara aturan umum hukum pidana (Buku I) dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang (Buku II dan Buku III KUHP), dapat digambarkan secara singkat pada contoh sebagai berikut. Ketentuan mengenai Batas-batas Berlakunya Aturan Pidana yang dimuat dalam Bab I Buku I adalah berupa batasan berlakunya ketentuan hukum pidana perihal larangan-larangan melakukan perbuatan yang

---

<sup>7</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 74

---

<sup>8</sup>Adami Chazawi., *Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Grafito Persada, 2005, hlm 3.

disertai ancaman pidana bagi si pelanggarnya (terutama) sebagaimana yang dimuat dalam Buku II dan Buku III KUHP. Demikian juga aturan umum Bab IV mengenai Percobaan (*Poging*) atau aturan umum dalam Bab V mengenai Penyertaan (*Deelneming*) adalah berupa aturan umum hukum pidana yang menjadi dasar untuk dapat dipidanya Percobaan dan Penyertaan dalam hal larangan berbuat yang disertai ancaman pidana (disebut tindak pidana) yang diatur dalam Buku II dan Buku III sebagai catatan, mengenai Percobaan (53) dan bantuan (56) berlaku pada kejahatan saja.<sup>9</sup> Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah Pidana dengan istilah Hukuman. Sudarto mengatakan bahwa istilah hukuman. kadang-kadang digunakan untuk pergantian perkataan *straf*, tetapi menurut beliau istilah Pidana lebih baik dari pada Hukuman.<sup>10</sup>

## **2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan**

### **Tindak Pidana Perusakan Hutan**

Sanksi pidana yaitu suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sanksi adalah yang sangat sering kita dengar, dalam lingkup masyarakat kecil pun kata sanksi ini banyak digunakan untuk menghukum seseorang yang bersalah. Misalnya saja ada orang yang mencuri kayu di hutan, dan orang yang melakukan kejahatan tersebut akan dikenakan pasal-pasal yang sesuai dengan perilaku yang dilakukan saat melakukan kejahatan sehingga orang yang melakukan kejahatan akan ditindak pidana oleh aparat kepolisian dan menghukum pelaku tersebut dengan pasal yang sesuai kejahatannya.

Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah Pidana dengan istilah Hukuman. Sudarto mengatakan bahwa istilah hukuman. kadang-kadang digunakan untuk pergantian perkataan *straf*, tetapi

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm 4

<sup>10</sup>Sudarto., *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1997.



menurut beliau istilah Pidana lebih baik dari pada Hukuman.<sup>11</sup> Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Suatu perbuatan yang disertai dengan ancaman pidana dalam artian ini sering disebut dengan Tindak Pidana atau perbuatan Pidana (berasal dari kata *strafbaar feit*), yang juga sering disebut Delik (berasal dari kata *Delict*). Tindak Pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Jadi,

perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.<sup>12</sup> Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Wadah tindak pidana ialah undang-undang, baik terbentuk kodifikasi yakni KUHP dan diluar kodifikasi, tersebar luas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Di dalam KUHP dimuat dalam Buku II mengenai jenis kejahatan dan buku III mengenai pelanggaran. Tindak pidana yang dirumuskan baik sebagai kejahatan maupun pelanggaran di tujukan pada orang (subjek hukum pidana). Hanya sebagai kecil tindak pidana yang juga ditujukan pada subjek hukum badan. Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa

---

<sup>11</sup>Sudarto., *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1997, hlm 56

---

<sup>12</sup> Adami Chazawi., *op., cit*, hlm 6.

perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana, yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, maka orang tersebut disebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Dengan begitu, aturan atau larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat.

Penyertaan dalam Tindak Pidana yaitu suatu tindak pidana tidak selalu dilakukan oleh seorang pembuat (*dader*), tetapi kadang-kadang dapat juga oleh beberapa orang. Jika beberapa orang tersangkut di dalam terwujudnya suatu tindakan, maka disitu dapat dilihat adanya kerja sama. Juga didalam mewujudkan suatu tindak pidana kadang-kadang perlu ada pembagian pekerjaan

diantara orang itu.<sup>13</sup> Ketentuan penyertaan yang dibentuk dan dimuat dalam KUHP bertujuan agar dapat menghukum orang-orang yang terlibat dalam kasus tindak pidana dalam praktiknya tindak pidana dapat diselesaikan oleh beberapa atau banyak orang yang setiap orang melakukan wujud-wujud tingkah laku tertentu, dari tingkah laku mereka itulah melahirkan suatu tindak pidana. Pada peristiwa nyatanya, kadang sulit dan kadang mudah untuk menentukan siapa diantara mereka perbuatannya benar-benar telah memenuhi rumusan tindak pidana, artinya dari perbuatannya yang melahirkan suatu tindak pidana itu.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Selanjutnya disebut dengan (UU No.18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan). Ditentukan bahwa perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan

---

<sup>13</sup>Adami Chazawi, *Percobaan dan Penyertaan dalam Tindak Pidana*, Penerbit, Grafindo Persada, 2005, hlm 69.

dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum. Selain itu, dalam undang-undang tersebut diaturlah UU No.18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan memiliki tujuan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan dan menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak<sup>14</sup>

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan keseluruhan hasil pembahasn diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Pelaku Penyertaan Dalam Tindak Pidana Perusakan Hutan, melakukan

kejahatan Pasal 88 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dijatuhi pidana yang sama yaitu pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Ini artinya pembebanan

pertanggungjawaban setiap orang yang terlibat bersama-sama kedalam suatu tindak pidana, dipandang dan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama dengan orang yang sendirian (dader) melakukan tindak pidana, tanpa dibeda-bedakan baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun apa yang ada dalam sikap batinnya, sesuai dengan bentuk dan luasnya wujud

---

<sup>14</sup>UU No. 18/2013., tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan psl 3, hlm 6.

perbuatan masing-masing orang dalam mewujudkan tindak pidana.

2. Berdasarkan UU No.18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, ancaman sanksi pidana yang diberikan bagi pelaku yang turut serta adalah maksimum hukuman yang dapat ditetapkan baginya adalah sama dengan maksimum sanksi pidana yang dapat dikenakan pada si pembuat.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut :

1. Dalam rangka penegakan hukum hal-hal yang berkenaan dengan penyertaan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan tindakan penagak hukum

Bagi setiap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Perusakan Hutan, Penegak Hukum memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana perusakan hutan sesuai dengan terdakwa dan dapat menganalisis dengan baik tindak pidana yang dilakukan, sehingga terdakwa mendapatkan efek jera dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

2. Agar kiranya Penegak Hukum bias lebih tegas dalam menangani kasus Pemberantasan Perusakan Hutan sehingga si Pembuat/Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Perusakan Hutan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

## Daftar Pustaka

### Buku-buku :

- Adami Chazawi., Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan  
dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Grafindo Persada. 2005  
----- Percobaan dan Penyertaan, dalam Tindak Pidana,  
Grafindo Persada, 2005.
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta,  
Jakarta, 2004.
- Amiruddin., Zainal Asikin., Pengantar Metode Penelitian Hukum,  
Grafindo Persada, Jakarta., 2003.
- Amir Ilyas., Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta, 2012,
- Bunga Rampai, Perundang-undangan Lingkungan Hidup,  
Yogyakarta, Pustaka Widyatama, 2005.
- KUHP., Buku Kesatu (ketentuan umum)., Penyertaan Dalam  
Tindak Pidana.
- Moeljatno., Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Rineka Cipta,  
Jakarta, 2002.
- Mohammad eka putra dan Abul khair, percobaan dan penyertaan,  
Medan, USU Press, 2009.
- P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT.  
Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2001

Sutrisno Hadi, Metode Penelitian, Rineka Cipta, Jakarta, 1989.

Salim., Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Sinar Grafika, 2006,

Sudarto., Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1997.

#### **UNDANG – UNDANG :**

Undang - Undang Nomor. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

#### **PERATURAN :**

Industri Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan kayu secara Ilegal di kawasan Hutan dan Predarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Kehutanan, dan Menteri Perindustrian Nomor KM. 3 Tahun 2003, Nomor 22/Kpts-II/2003, dan Nomor 33/MPP/Kep/1/2003 tentang Pengawasan Pengangkutan Kayu Melalui Pelabuhan

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 68/MPP/Kep/2/2003 tentang Perdagangan kayu antar pulau.

Peraturan Pemerintah No : 6 Tahun 2007, tentang Tata hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan.

#### **INTERNET :**

[Http://www.blogspot.com/Unsur-Unsur Tindak Pidana/html](http://www.blogspot.com/Unsur-Unsur Tindak Pidana/html).

[Http://www.blogspot.com/Jenis-Jenis Tindak Pidana/html](http://www.blogspot.com/Jenis-Jenis Tindak Pidana/html).

[Http://www.blogger.com/PengertianHutan/html](http://www.blogger.com/PengertianHutan/html).

**BIODATA**

**NAMA : AHMAD AFANDI**

**TTL : PALU, 10 JUNI 1990**

**ALAMAT : Jln, TOMBOLOTUTU Lrg. Pakora 1**

**E-MAIL : lahabufandi@gmail.com**

**TELPON/HP : 085298549151**